



Judul : Pemerintah Jamin Stok Pangan dan Pupuk Aman
Tanggal : Rabu, 08 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

KETAHANAN PANGAN

Pemerintah Jamin Stok Pangan dan Pupuk Aman

JAKARTA, KOMPAS — Perang di Timur Tengah dan El Nino berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional. Namun, pemerintah menjamin stok pangan, pakan, dan pupuk aman. Di sisi lain, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan ketahanan stok pangan yang bersumber dari impor.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, ID Food, dan PT Pupuk Indonesia (Persero). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi itu digelar secara hibrida di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menteri Pertanian dan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan, perang di Timur Tengah dan El Nino membuat lantangan ketahanan pangan pada tahun ini kian kompleks. Namun, pemerintah menjamin ketersediaan pangan dan pakan nasional tetap aman.

Merujuk data Proyeksi Neraca Pangan hingga Mei 2026, neraca beras dan jagung pakan diperkirakan surplus masing-masing 16,39 juta ton dan 4,3 juta ton. Selain itu, neraca gula konsumsi surplus 630.000 ton, daging ayam 837.000 ton, dan telur ayam 432.000 ton.

Bahkan, lanjut Amran, per 7 April 2026, cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog mencapai 4,6 juta ton. Jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama 10-11 bulan ke depan. "El Nino diperkirakan berlangsung selama enam bulan. Dengan CBP sebesar itu, kebutuhan konsumsi beras nasional terjamin aman," ujarnya.

Amran menyatakan, Kementan memiliki sejumlah strategi untuk mengantisipasi dampak El Nino. Beberapa di antaranya adalah mempercepat tanam padi, mengoptimalkan sumber-sumber air melalui optimalisasi, dan merehabilitasi irigasi.

Sementara Bapanas berupaya menjaga stabilitas stok dan harga pangan, sekaligus menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa upayanya adalah membentuk Satuan Tugas Sapa Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan,

serta menyalurkan beras dan jagung pakan. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). "Kami juga memberikan bantuan pangan bagi 33,2 juta keluarga berpenghasilan rendah dan memfasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit," kata Amran.

Dalam forum yang sama, PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin stok pupuk nasional aman. Ketersediaan pupuk itu tidak terdampak pemblokiran Selat Hormuz. Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menuturkan, Selat Hormuz merupakan jalur perdagangan sekitar 30 persen pupuk dunia.

"Ketersediaan pupuk Indonesia tidak terganggu karena produksi pupuk di dalam negeri cukup besar. Saat ini, stok pupuk nasional, baik subsidi maupun nontsubsidi, sebanyak 1,29 juta ton," tuturnya.

Sebelumnya, Pupuk Indonesia menginformasikan masih ada sebagian bahan baku pupuk yang diimpor, terutama untuk memproduksi NPK. Namun, impor bahan baku pupuk tersebut tidak mengandalkan negara-negara di kawasan teluk. Sebab, ini harga pupuk nasional tidak dinaikkan meski harga berbagai jenis pupuk dunia melonjak.

Merujuk Data Harga Komoditas (The Pink Sheet) yang dirilis Bank Dunia pada 2 April 2026, harga pupuk urea di tingkat internasional naik dari 472 dolar AS per ton pada Februari 2026 menjadi 725,6 dolar AS per ton pada Maret 2026. Dalam periode perbandingan yang sama, Indeks Harga Pupuk juga naik dari 143 menjadi 183.

Impor pangan

Dalam rapat itu, Komisi IV DPR mempertanyakan ketahanan stok pangan yang masih bergantung dari impor. Anggota Komisi VI DPR, Johan Rosihan, mengatakan, banyak komoditas neraca pangan yang surplus. CBP juga sangat kuat. Namun, Indonesia juga masih bergantung pada impor sejumlah komoditas pangan.

Setiap tahun, Indonesia mengimpor kedelai sekitar 2,5 juta ton dan daging sapi berkisar 30-40 persen dari total kebutuhan nasional. Selain itu, gandum juga masih 100 persen impor, sedangkan susu selalu defisit rerata 3,4 juta

ton per tahun. "Mustahil jika perang di Timur Tengah tidak mengganggu pasokan pangan nasional yang masih bergantung pada impor," katanya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu juga menilai, neraca pangan yang dipaparkan Bapanas belum mencerminkan skenario krisis. Padahal, angka ketergantungan impor sejumlah komoditas pangan Indonesia masih tinggi.

Untuk itu, ia meminta pemerintah memiliki kepekaan dan kewaspadaan terhadap krisis. Pemerintah perlu membuat skenario krisis dan strategi mengatasinya mengingat perang di Timur Tengah belum diketahui kapan akan berakhir.

Ellen Esther Pelealu, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat, mendorong pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan selain beras. Ini mengingat Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah komoditas pangan, termasuk kedelai dan bawang putih.

Untuk kedelai, misalnya, pada 2024 dan 2025 Indonesia masih mengimpor komoditas tersebut masing-masing sebanyak 2,5 juta ton dan 2,062 juta ton. Perlu memiliki target produksi kedelai di dalam negeri secara realistis untuk mengurangi ketergantungan impor.

"Kami juga berharap ada intervensi konkret dari pemerintah agar petani tertarik menanam kedelai. Upaya serupa juga perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih," kata Ellen.

Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Indeks Harga Pangan pada Maret 2026 sebesar 128,5 atau naik 2,4 persen secara bulanan. Kenaikan itu terjadi di semua indeks kelompok komoditas, seperti sereal, daging, susu, minyak nabati, dan gula.

Dalam periode perbandingan yang sama, Indeks Harga Daging mencapai 127,7 atau naik 1 persen secara bulanan. Indeks Harga Susu juga naik 1,2 persen secara bulanan menjadi 120,9, sedangkan Indeks Harga Gula naik 7,2 persen secara bulanan menjadi 92,4.

Adapun Indeks Harga Minyak Nabati pada Maret 2026 sebesar 183,1 atau naik 5,1 persen secara bulanan. (HEN)